

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

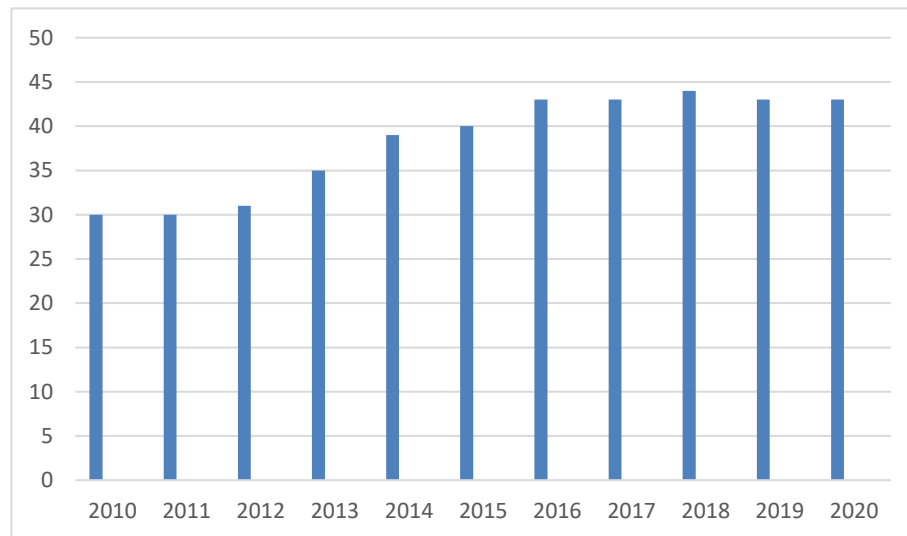
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Bank Persero adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya 51% atau lebih milik pemerintah (Edison Sutan Kayo, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) Seluruh Bank BUMN yang terdaftar di BEI diawasi oleh OJK.

Bursa Efek Indonesia merupakan badan pengelola bursa yang bertugas memfasilitasi perdagangan pasar modal di Indonesia (Lely Shofa, 2015). Menurut Undang-Undang RI NO. 8 tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bursa efek adalah sebuah wadah yang diciptakan untuk memberi fasilitas dengan membuat sebuah sistem yang dapat menghubungkan pihak-pihak luar dalam melakukan transaksi jual beli bursa. BEI merupakan perusahaan publik resmi di Indonesia, sehingga perusahaan yang ingin *go publik* di Indonesia harus melalui BEI, salah satunya perusahaan sub sektor perbankan. Berikut ini adalah daftar perkembangan jumlah perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2010 hingga 2020:

**Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Perbankan di BEI Tahun 2010-2020**



*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah penulis (2022)*

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah perbankan di Bursa Efek Indonesia fluktuatif, tetapi cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh bersumber dari data Bursa Efek Indonesia, saham emiten perbankan masih mendominasi jajaran saham dengan kapitalisasi pasar (*market capitalization*).

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perbankan BUMN. Bank Persero atau Bank BUMN yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2020 terdiri dari 4 bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara

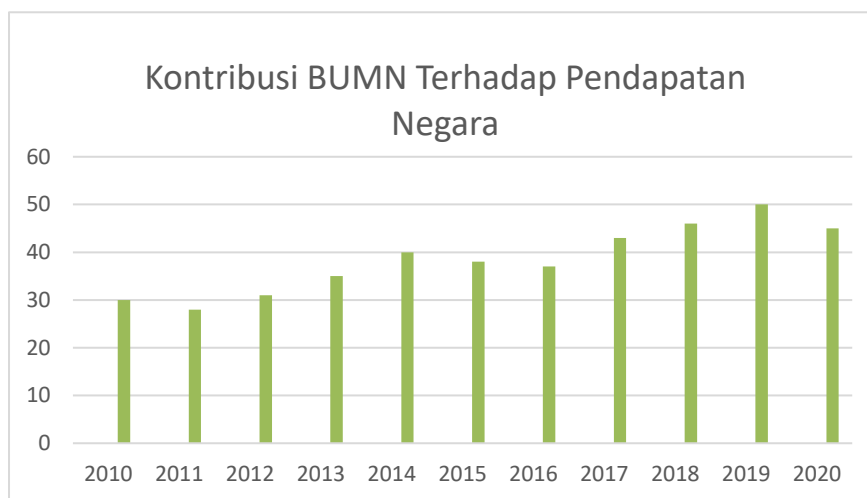
**Tabel 1. 1 Daftar Perbankan BUMN yang kk di BEI**

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tangga IPO
1	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10 November 2003
2	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14 Juli 2003
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25 November 1996
4	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17 Desember 2009

*Sumber:* Bursa Efek Indonesia,, Data diolah penulis (2022)

Peran bank berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu disebutkan bahwa tujuan perbankan Indonesia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Sunarsip (2003) dalam (Bachtiar, 2019), di negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan industri perbankan menjadi semakin penting karena adanya *saving-investment gap* yang tidak bisa diatasi oleh anggaran pemerintah. Keterlibatan perbankan pada kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat akan sangat membantu proses pembangunan ekonomi. Sehingga tidak mengherankan jika peranan perbankan dalam perekonomian negara berkembang lebih mendominasi dibandingkan dengan perbankan di negara-negara maju. Selain dapat berperan penting di dalam menopang pembangunan nasional, laba yang dihasilkan oleh perbankan khususnya perbankan BUMN, juga berkontribusi terhadap pendapatan negara yang berupa pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB). Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara terhadap pendapatan negara tahun 2010-2020.

**Gambar 1. 2 Laba BUMN Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2010-2020 (Dalam Triliun)**



*Sumber:* Kementerian Keuangan, Data diolah penulis (2022)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan mencatat kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap penerimaan dalam bentuk pajak kurun waktu satu dekade yakni 2010 hingga 2020 mencapai Rp 1.709,8 triliun. Penerimaan pemerintah dari laba BUMN pada tahun 2020 beberapa diantaranya berasal dari laba BUMN perbankan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 6,9 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 6,2 triliun, dan Rp 500 miliar diperkirakan berasal dari PT BNI (Persero) Tbk. Selain itu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan 3 sumbangan dividen BUMN terbesar kepada negara pada 2020 yang lalu mencapai Rp 45 triliun berasal dari sektor perbankan. Penyumbang terbesar yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan kontribusi sebesar 26,4 % dari total dividen BUMN. Lalu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 22,2% dan PT BNI (Persero) Tbk dengan kontribusi 5,2%.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Kinerja keuangan yang optimal merupakan tujuan perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan selain keputusan keuangan adalah dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* (Jariah, 2019). Kinerja keuangan juga dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan dan tata cara tertentu dengan menggunakan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan yang ditetapkan (Azis & Hartono, 2017). Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu (Rudianto, 2006). Kinerja keuangan perusahaan menjadi sasaran penting perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan termasuk pada lembaga perbankan, karena menggambarkan kemampuan dari bank tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya (Budi gautama Siregar, 2021).

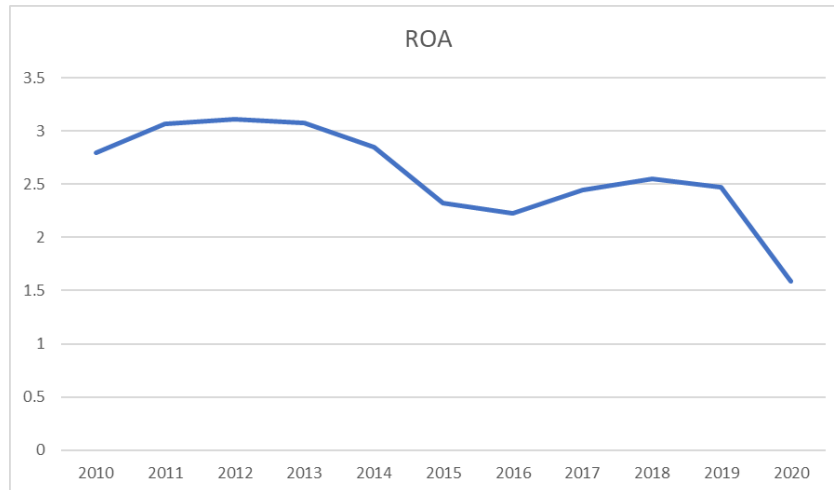
Meningkatkan kinerja perusahaan merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk menyejahterakan para pemegang saham. Kinerja keuangan perusahaan tercermin melalui laporan keuangan yang diterbitkan. Hubungan baik antara pemegang saham (*Shareholder*) dan manajemen perusahaan akan berlanjut jika pemegang saham puas dengan kinerja keuangan perusahaan, kinerja manajemen, dan menafsirkan signal perusahaan sebagai signal yang positif. Hal ini dijelaskan pada teori keagenan (*agency theory*) bahwa di sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pemegang saham sebagai *pricipal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent* yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan bank harus diukur, menggunakan penilaian terhadap faktor- faktor: *Risk Profile*, *GCG*, *Earnings*, dan *Capital*. Menurut (Saifullah, Listiawati, & Abay 2016), Salah satu

rasio yang digunakan untuk menilai prestasi perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri dari tujuh rasio yaitu: *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Operating Return On Assets (OPROA)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Operating Ratio (OPR)*.

Penggunaan rasio *Return On Asset* dalam mengukur kinerja keuangan karena Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian *Return On Asset* karena profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset dengan sumber terbesarnya dari dana pihak ketiga atau masyarakat (Budi gautama Siregar, 2021). *Return On Assets* yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya dalam memperoleh *earning*. Semakin besar ROA suatu perusahaan, berarti semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan aktiva yang dimiliki, dengan kata lain dengan jumlah yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar ataupun sebaliknya (Azis & Hartono, 2017). Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu SE No.13/24/DPNP pada 25 Oktober 2011, menyebutkan bahwa ketentuan batas minimal ROA yang ideal bagi bank adalah 1,5%. Jika bank memperoleh nilai ROA dibawah nilai batas minimal tersebut maka bank tersebut dinyatakan belum optimal dalam mengelola asetnya.

**Gambar 1. 3 Grafik Rata-Rata ROA pada Perbankan di Indonesia Tahun 2010-2020**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah Penulis (2022)

Gambar 1.1 di atas menunjukkan nilai rata – rata *Return On Asset* (ROA) dari perusahaan perbankan periode 2010-2020. Perhitungan ROA pada perusahaan perbankan diprosikan dengan total laba bersih dibagi total aset dari tahun 2010 sampai 2020 yang dapat dilihat dengan melihat laporan tahunan masing-masing perusahaan. Walaupun mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, seluruh nilai rata-rata ROA perusahaan perbankan dari tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil perhitungan dibawah nilai minimal ROA yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia, yaitu 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan di Indonesia dapat mengelola asetnya dengan optimal.

Fenomena yang melibatkan persoalan perolehan laba bersih salah satunya adalah Bank BRI. Adanya kasus Covid-19 menyebabkan laba bersih pada kuartal III tahun 2020 menurun sebesar 36,9% yaitu sebesar Rp 10,2 triliun dibandingkan pada semester I tahun 2019, laba bersih BRI sebesar Rp 16,16 triliun. Penurunan laba bersih pada semester II tahun 2020 ini disebabkan oleh dilakukannya restrukturisasi kredit senilai Rp 189 triliun yang menyebabkan berkurangnya daya keuntungan profitabilitas. Hal ini menyebabkan nilai ROA BRI tahun 2020 menjadi 1,95%, menurun sebesar 1,55% dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BRI belum mampu mempertahankan kinerja keuangannya dengan memanfaatkan aktiva yang dipunya.

Fenomena lain yang terjadi saat covid-19 adalah justru pada kuartal IV-2020 Bank BTN mencatatkan perolehan laba bersih senilai RP 1,60 triliun pada kuartal IV/2020, meningkat dari posisi Rp 209 miliar pada periode tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan BTN, laba bersih perseroan ditopang pendapatan bunga sebesar Rp25,16 triliun pada kuartal IV/2020. Pendapatan bunga tersebut disumbang oleh penyaluran kredit yang tetap bertumbuh meski berada di bawah tekanan pandemi. Hal ini mengakibatkan nilai ROA pada Bank BTN tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0,13% menjadi 0,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTN dapat Menyusun strategi pemanfaatan aktiva ditengah masa pandemi dan dapat memperbaiki kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan yang baik tidak bisa lepas dari peran tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (Supitriyani et al, 2020). Pada prinsipnya *Good Corporate Governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Per-01/MBU/2011 pasal 3 yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Berdasarkan *agency theory* yang dikatakan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” sebagai pihak yang diberi tugas oleh pemegang saham atau “*principal*” harus bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan. Teori agensi mendorong munculnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meminimalkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. GCG memberi jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan (Hamdani, 2016).



Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diyakini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan profitabilitas perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Istighfarin, Gusti, & Wirawati, 2005). Penerapan GCG pada perbankan BUMN diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi dan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan terutama kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat. *Good Corporate Governance* yang efektif pada sebuah perusahaan akan membuat sebuah manajemen tidak menyalah gunakan kewenangan dan bekerja demi kepentingan perusahaan (Nurchayani, 2013).

Dewan direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan strategi yang disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berlangsung secara efektif (Dewata et al. 2018). Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan masing-masing tugas dan wewenangnya. Tetapi, pelaksanaan tugas oleh Direksi adalah tanggung jawab bersama. Tingkat posisi masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah sejajar. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial (Rahmawati, Rikumahu, Brady, & Dillak, 2017).

Dewan direksi bertanggung jawab atas tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan laba dalam perusahaan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham sehingga investor mempunyai pertimbangan dalam kegiatan investasi jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh (Eksandy, 2018) mengungkapkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan pada penelitian (Tulung et al. 2020) mengungkapkan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Komite Pemantau Risiko merupakan pihak yang independen, karena komite ini dirancang oleh dewan komisaris, dengan tugas membantu tugas dewan komisaris sebagai penasihat dan pengawas perusahaan, khususnya dalam hal

mitigasi risiko yang berpotensi memperburuk kinerja keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, komite pemantau risiko dibentuk untuk mendukung peningkatan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan karena komite pemantau risiko bertugas untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian (Zulfikar, 2021) menyatakan bahwa komite pemantau risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian oleh (Tulung et al., 2020) menyatakan jumlah dari Komite Pemantau Risiko tidak mempengaruhi kinerja keuangan sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan kompetensi, skill dan profesionalitas yang di miliki setiap Komite Pemantau Risiko.

Komite Remunerasi adalah salah satu organ perusahaan yang membantu kinerja dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris terkait remunerasi terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Remunerasi merupakan imbalan atau balas jasa terhadap kinerja karyawan yang dapat memotivasi kinerja manajer menjadi lebih baik dan hal tersebut membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat (Ruparelia dan Njuguna, 2016). Berdasarkan hasil penelitian (Setyawati dan Hidayati, 2019) jumlah wanita pada komite remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA). Menurut penelitian (Destiana dan Muslih, 2019) berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel komite remunerasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Peneltian ini mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan menggunakan rasio keuangan dalam pengaruh terhadap tingkat profitabilitas perbankan. Dalam penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa yang menjadi hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada.

Bedasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Corporate governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Sub Sektor Perbankan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2020)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Peran bank sangat penting dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Pengaruh bank yang berkontribusi terhadap pendapatan negara dalam bentuk pajak dan dividen sangat besar. Hal ini dibuktikan oleh data dari kementerian keuangan Indonesia yang menyebutkan bahwa 3 dari 5 penyumbang terbesar perusahaan BUMN terhadap pendapatan negara tahun 2020 dalam bentuk dividen dihasilkan oleh perbankan BUMN. Semakin banyak laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin banyak pendapatan yang diterima oleh negara. Peningkatan laba bersih sangat bergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, salah satunya *Return On Asset (ROA)*.

Kinerja keuangan yang baik juga sangat bergantung kepada kinerja manajemen perusahaan dalam bentuk tata kelola perusahaan yang baik. Melalui pengawasan *Corporate Governance* yang baik akan mencegah terjadinya masalah sehingga laba meningkat dan kinerja keuangan meningkat sehingga dapat menarik investor. Tetapi pada kenyataanya ada beberapa perusahaan perbankan yang masih kurang baik dalam penerapan tata kelola perusahaan dengan adanya beberapa kasus pelanggaran penerapan pada prinsip *Good Corporate Governance* yang membuat kinerja keuangan menjadi memburuk.

Bedasarkan rumusan masalah diatas,, penelitian ini akan menjelaskan pengaruh Mekanisme *Corporate governance* terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan Perbankan BUMN yang terdaftar pada BEI periode 2010-2020.

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Dewan Direksi, Komite Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Kinerja Keuangan?
- 2 Apakah Dewan Direksi, Komite Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan?
- 3 Apakah terdapat pengaruh secara parsial Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan?
- 4 Apakah terdapat pengaruh secara parsial Komite Remunerasi terhadap Kinerja Keuangan?
- 5 Apakah terdapat pengaruh secara parsial jumlah Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana Dewan Direksi, Komite Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, dan Kinerja Keuangan.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dewan Direksi, Komite Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Komite Remunerasi terhadap Kinerja Keuangan.
- 5 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Keuangan.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi Akademis  
Hasil dari penelitian ini adalah media untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang akan membuat penelitian

selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif atau referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti pengaruh mekanisme *Corporate governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (BEI) 2010-2020.

### 1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi pihak luar atau eksternal, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu tolok ukur para calon investor dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
2. Dalam praktik perbankan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan perbankan.

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari sub-bab yang memberikan gambaran jelas mengenai materi pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan isi dilakukannya penelitian. Dengan sistematika dan rincian sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan penelitian secara umum, singkat dan padat yang menggambarkan isi penelitian. Terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini merupakan sub-bab yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung solusi permasalahan, serta

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode dan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menginterpretasikan pertanyaan penelitian.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.